



RENCANA STRATEGIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Rancangan Rencana Strategis ini hingga nantinya akan disahkan dan ditetapkan sebagai Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tidak lupa disampaikan kepada seluruh pihak terutama aparatur yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029.

Jambi, 14 November 2025
Kepala Dinas,



Asraf. S.Pt. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196611201994031006

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk membuat dokumen dasar sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran. Sistematika penyajian Rencana Strategis secara garis besar adalah :

1. Identifikasi potensi dan permasalahan:

Menganalisis kondisi eksisting sektor kelautan dan perikanan, termasuk potensi sumber daya, tantangan, dan peluang yang ada.

2. Rumusan visi dan misi :

Menetapkan arah pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah yang ingin dicapai.

3. Penetapan tujuan dan sasaran :

Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu (5 tahun) serta indikator keberhasilan yang terukur.

4. Penyusunan strategi :

Menentukan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, termasuk kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

5. Penetapan program dan kegiatan :

Menjabarkan langkah-langkah operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

6. Pengalokasian anggaran :

Menentukan sumber dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

7. Evaluasi dan monitoring :

Menyediakan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Renstra secara berkala.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah....	31
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..	46
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	46
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	46
3.3. Strategi Perangkat Daerah	50
3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	51
IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	60
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	88
V PENUTUP.....	100

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional di tingkat daerah. Kegiatan ini penting karena perencanaan strategis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis merupakan sebuah petunjuk atau pedoman organisasi yang dapat digunakan untuk merencanakan tujuan dari kondisi saat ini menuju kondisi 5 tahun mendatang lengkap dengan perencanaannya, langkah-langkahnya serta pengukurannya. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia..

Kemudian dipertegas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan serta pada ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

Lebih spesifik tentang perencanaan, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Instansi (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun sesuai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) mengamanatkan, bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 didasarkan dan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi.
2. Mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang lain, terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
2. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik karena adanya pengukuran kinerja yang jelas.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumberdaya Perangkat daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah
 - b. Isu strategis

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD.

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

V. PENUTUP

Bab ini memuat diantara Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB. II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada pasal 3 berbunyi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

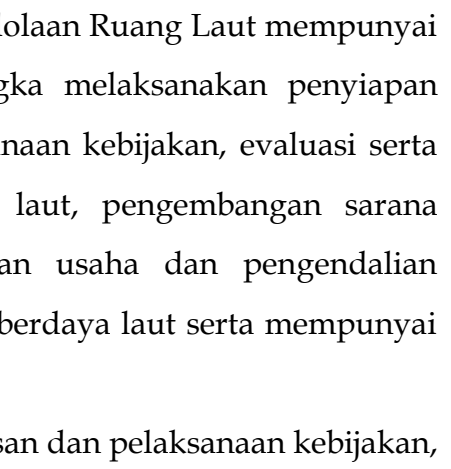
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membawahi sub bagian/seksi yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbag umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan ruang laut, pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, produksi dan usaha dan pengendalian sumberdaya ikan serta menggali potensi sumberdaya laut serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap;
 - b. Perencanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut;
 - c. Pengkajian dan penerapan teknologi perikanan tangkap;
 - d. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - e. Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha;
 - f. Perencanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
 - g. Pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan Provinsi dan pengelolaan ruang laut;
 - h. Penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana,

- perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta penguatan produksi pakan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bagi pelaku pembudidayaan ikan;
 - b. Penguatan dan peningkatan produksi pakan dengan menginventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan;
 - c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;
 - d. Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan;
 - e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumberdaya manusia) SDM bidang perikanan budidaya;
 - f. Pengkoordinasi, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - g. Pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan bagi pelaku pembudidaya ikan;
 - h. Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
 - i. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemasaran sumberdaya kelautan dan perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan, pelestarian ekosistem perairan dan penataan sumberdaya kelautan;
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta produk hasil perikanan;
- d. Pembinaan bagi pelaku pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk serta pemasarannya;
- e. Perumusan kebijakan teknis tentang penataan dan pelestarian ekosistem perairan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap;

5. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang dan dua Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Bagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan
- b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, membawahi :
 - Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi
 - Kepala Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, membawahi:
 - Kepala Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap
 - Kepala Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan
 - Kepala Seksi Pelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut
- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk, membawahi:
 - Kepala Seksi Pengawasan
 - Kepala Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
 - Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi
- e. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, membawahi :
 - Kepala Subbag Tata Usaha
 - Kepala Seksi Kesyahbandaran
 - Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan

- f. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), membawahi :
 - Kepala Subbag Tata usaha
 - Kepala Seksi Penerapan Mutu
 - Kepala Seksi Usaha Perikanan
- g. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 297 orang pegawai yang terdiri atas :

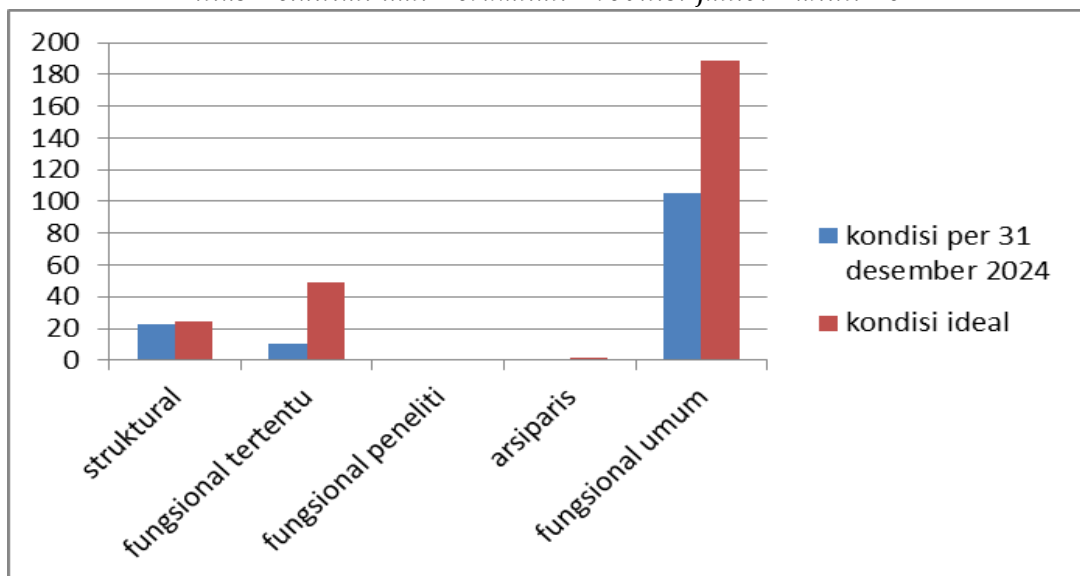
1. Pejabat Struktural 24 orang
2. Pelaksana (Staf) 122 orang
3. Tenaga Honorer Kontrak 151 orang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

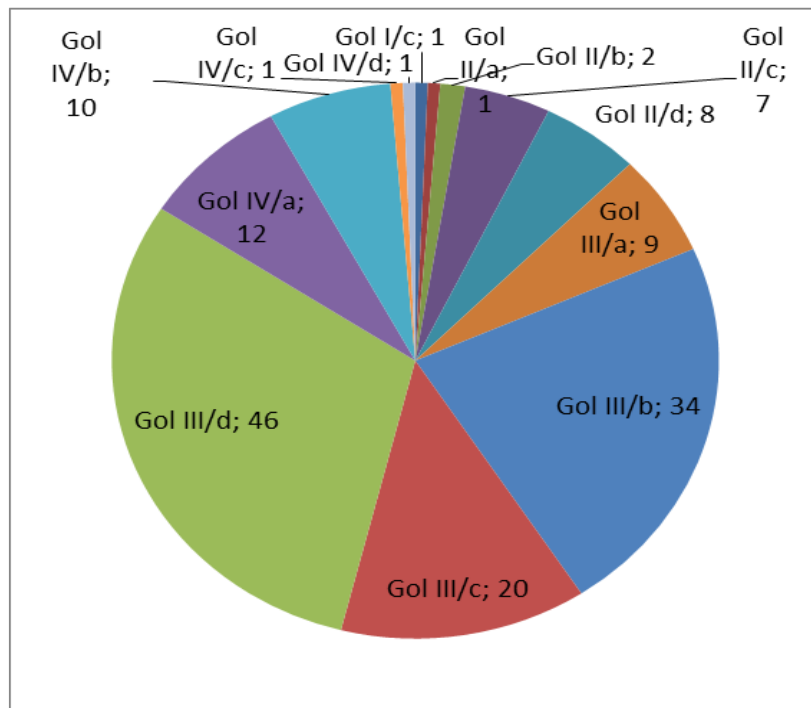
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 138 pegawai yang terdiri dari 23 pejabat struktural, 10 pejabat fungsional tertentu, dan 105 fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan dalam gambar berikut :

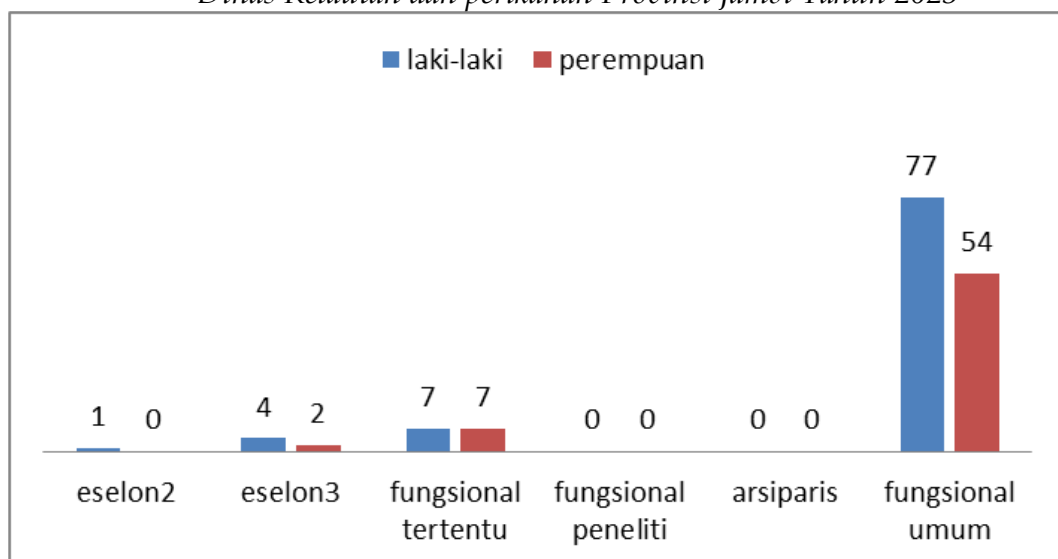
Gambar 2.1. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024



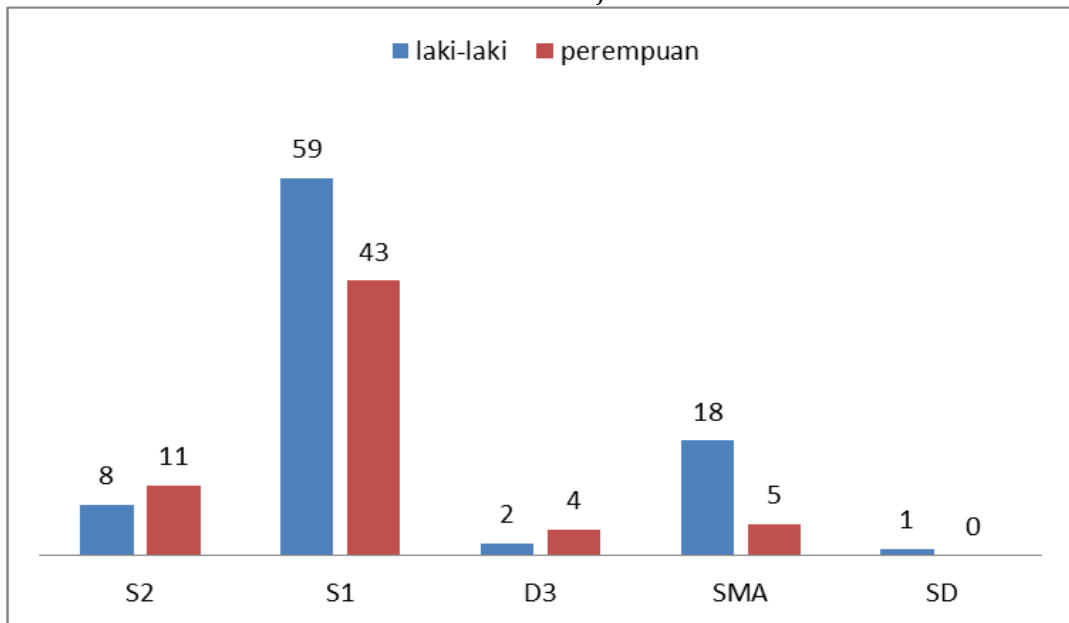
Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023



Gambar 2.4. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



Tabel 2.1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.

GOLONGAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
I.	-	-		-	-	-	-
II.	-	-		10	-	-	10
III.	4	96	5	13	-	-	119
IV.	16	7	-	-	-	-	23
JUMLAH	19	102	5	23	0	1	150
HONORER							163
JUMLAH TOTAL (PNS + HONORER)							313

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi.

Fasilitas kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sarana mobilitas, bangunan dan peralatan kantor, sebagai berikut :

a. Sarana mobilitas terdiri dari :

- Kendaraan Roda 6 : 3 unit
- Kendaraan Roda 4 : 27 unit (3 Rusak Berat)
- Kendaraan Roda 3 : 5 unit
- Kendaraan Roda 2 : 57 unit
- Exavator : 3 unit (2 Rusak Berat)

b. Sarana Bagunan terdiri dari :

- Bangunan perkantoran/mess, gudang : 169 unit
- Rumah Dinas : 1 unit
- Musholla : 2 unit

c. Peralatan Kantor terdiri dari :

- Komputer : 70 unit
- Laptop : 36 unit
- Mesin Tik : -
- Note Book : 3 unit

d. Perpustakaan Dinas : 1 unit

2.1.3. Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjadi komoditi unggulan, karena Jambi memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik di sektor perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan peranan dan dukungan yang sangat penting, dengan mengembangkan potensi dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada dapat menjadi salah satu unggulan daerah.

Provinsi Jambi Terletak sangat strategis, yaitu di bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas Internasional. Provinsi Jambi memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar, baik untuk pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan umum, Jambi memiliki wilayah Sungai dengan Panjang 1.740 Km, Potensi lahan tambak di Jambi mencapai 18.000 Ha dan potensi lahan marginal (pengembangan Budidaya Ikan daratan) potensi mencapai 100.700 Ha, kemudian luas laut di Provinsi Jambi mencapai 227.363,10 Ha dan luas perairan umum mencapai 115.000 Ha, serta potensi Kawasan Konservasi Perairan sebesar 39.143 Ha. Kawasan tersebut selain dapat dikembangkan untuk usaha perikanan, juga dapat dikembangkan untuk Kawasan wisata Bahari.

Secara rinci potensi sektor kelautan dan perikanan disajikan dalam Gambar sebagai berikut :

Gambar 2.5. Potensi Sektor kelautan dan Perikanan

No	Sektor Kegiatan	Potensi	Pemanfaatan TAHUN 2024	Pemanfaatan (%)
A. Perikanan Tangkap				
1.	Perairan Laut	71.820 Ton/Thn	46.417,1 Ton/Thn	64,5 %
2.	Perairan Umum	35.500 Ton/Thn	7.299,2 Ton/Thn	23,0 %
B. Perikanan Budidaya				
1.	Budidaya Tambak/Air Payau	18.000 Ha	44,9 Ha	0,2 %
2.	Budidaya Kolam	100.700 Unit	45.506 Unit	45,2 %
3.	Budidaya Keramba/KJA	115.000 Unit	70.889 Unit	61,6 %
4.	Mina Padi	350 Ha	9,3 Ha	2,7 %

*Data Potensi berdasarkan kajian potensi 1988/1997

Gamabar 2.6. Potensi Perikanan Budidaya yang telah termanfaatkan

Kab/Kota	Potensi Perikanan Budidaya				
	Kolam (Unit)	Keramba (Unit)	Tambak (Unit)	Mina Padi (Ha)	UPR (kelompok)
BATANGHARI	1.203	6.285	0	30	4
BUNGO	750	659	0	25	26
KERINCI	1.364	1.568	0	30	7
KOTA JAMBI	123	652	0	0	280
KOTA SUNGAI PENUH	173	83	0	5	11
MERANGIN	6.530	168	0	25	21
MUARO JAMBI	7.245	6.710	0	30	28
SAROLANGUN	2.178	185	0	15	14
TANJUNG JABUNG BARAT	2.365	25	11	10	5
TANJUNG JABUNG TIMUR	532	0	67	10	5
TEBO	3.172	158	0	29	52
PROVINSI JAMBI	25.635	16.493	78	209	453

Sumber : Dinas Perikanan Lab/Kota se-Provinsi Jambi

Gamabar 2.7. Potensi Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Jambi

Kecamatan	Luas (Ha)
Kawasan Konservasi Perairan (Suaka)	
Seberang Kot	2.505,36
Tungkal Ilir, Kuala Betara, Kec. Mendahara	8.182,13
Mendahar, Kec. Kuala Jambi	5.713,04
Kuala Jambi, Kec. M. Sabak Timur	11.213,36
Muara Sabak Timur, Kec. Nipah Panjang	5.833,19
KKP3K (Taman)	
Nipah Panjang	2.135,90
Sadu	3.560,45
Total Luas Kawasan Konservasi dan PP3K	39.143,43

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Gambar 2.8. Data Suaka Perikanan dan Lubuk Larangan Provinsi Jambi

Kab/Kota	Suaka Perikanan	Lubuk Larangan	Jumlah
BATANGHARI	1	30	31
BUNGO	7	98	105
KERINCI	3	16	19
KOTA JAMBI	1	0	1
KOTA SUNGAI PENUH	0	0	0
MERANGIN	1	82	83
MUARO JAMBI	2	0	2
SAROLANGUN	6	36	42
TANJUNG JABUNG BARAT	6	3	9
TANJUNG JABUNG TIMUR	2	8	10
TEBO	1	0	1
PROVINSI JAMBI	30	273	303

Sumber : DKP Jambi (Tahun 2018)

Gambar 2.9. Luas dan Data Hutan Mangrove

Luas (Ha)	Kondisi			Kondisi (%)		
	Rapat	Sedang	Jarang	Rapat	Sedang	Jarang
9,787.7	4,348.62	2,741.73	2,697.34	44.43	28.01	27.56

Sumber : DKP Jambi (Tahun 2018)

Jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 3.724.300 jiwa (*Jambi dalam angka, 2025*) dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km². Untuk penduduk Provinsi Jambi yang merupakan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 41.495 jiwa atau sebesar 1,11% dari total penduduk Jambi.

Rincian pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.10. Data Jumlah Penduduk Provinsi Jambi

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAMBI	
Kabupaten/Kota	2024
Kerinci	256.700
Merangin	375.400
Sarolangun	306.500
Batanghari	316.600
Muaro Jambi	424.600
Tanjab Timur	239.000
Tanjab Barat	335.100
Tebo	355.300
Bungo	381.300
Kota Jambi	635.100
Kota Sungai Penuh	100.800
Provinsi Jambi	3.724.300

Sumber : Jambi dalam angka. 2025

Gambar 2.10. Data Jumlah Pembudidaya Ikan di Provinsi Jambi

Kab/Kota	Jumlah RTP	Jumlah Pembudidaya (Orang)	Luas Lahan (m2)
BATANGHARI	1.529	1.529	4.743.000
BUNGO	1.661	2.188	2.686.628
KERINCI	1.352	1.855	1.534.363
KOTA JAMBI	2.324	2.324	2.999.400
KOTA SUNGAI PENUH	1.407	1.710	45.900
MERANGIN	2.316	2.316	3.618.220
MUARO JAMBI	2.557	3.692	5.645.808
SAROLANGUN	1.521	1.521	1.500.040
TANJAB BARAT	1.112	1.439	2.617.980
TANJAB TIMUR	1.082	1.082	582.642
TEBO	1.430	1.430	500.398
TOTAL	18.291	21.086	26.474.379

Sumber : One Data KKP 2024

Gambar 2.11. Data Jumlah Nelayan di Provinsi Jambi

Kab/Kota	PUD	Laut	Total
BATANGHARI	1.041		1.041
BUNGO	1.559		1.559
KERINCI	1.173		1.173
KOTA JAMBI	850		850
KOTA SUNGAI PENUH	255		255
MERANGIN	781		781
MUARO JAMBI	1.559		1.559
SAROLANGUN	1.831		1.831
TANJUNG JABUNG BARAT	1.089	4.648	5.737
TANJUNG JABUNG TIMUR	614	3.538	4.152
TEBO	609		609
TOTAL	11.361	8.186	19.547

Sumber : One Data KKP. 2024

Gambar 2.12. Data Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi Jambi

Kab/Kota	2023	2024
BATANGHARI	45	46
BUNGO	27	30
KERINCI	37	37
KOTA JAMBI	647	639
KOTA SUNGAI PENUH	30	30
MERANGIN	25	21
MUARO JAMBI	21	22
SAROLANGUN	17	17
TANJAB BARAT	304	339
TANJAB TIMUR	566	599
TEBO	27	28
TOTAL	1.746	1.808

Sumber : One Data KKP 2024

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan di bidang kelautan dan perikanan selama 5 (lima) tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 s/d 2024 dan Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 berikut ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2021)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Prediket Nilai SAKIP	BB Indeks	AA Indeks	BB Indeks	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks	BB Indeks	BB Indeks	BB Indeks	A Indeks	AA Indeks	100	100	100	100	100
2	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	53.833,00	55.800,30	54.480,90	54.807,80	55.136,70	55.467,50	55.800,30	54.478,00	54.807,50	45.187,80	55.467,50	55.800,30	99,99	100,00	81,96	100,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	52.067,00	64.843,60	57.168,00	58.997,00	60.885,00	62.833,00	64.843,60	50.428,00	50.087,10	49.595,00	62.833,00	64.843,60	88,21	84,90	81,46	100,00	100,00
3	Meningkatnya kualitas lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	-	10 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	0	0	0	2 Izin	2 Izin	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan		39.143,44 Ha	10.687,49 Ha	16.400,53 Ha	27.613,89 Ha	33.447,08 Ha	39.143,44 Ha	0	0	0	0 Ha	0 Ha	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan yang Taat terhadap Peraturan Per Undang-Undangan (%)	45%	77%	60%	65%	70%	75%	77%	84%	65%	68%	75%	77%	140,00	100,00	97,14	100,00	100,00

			Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	39,40	42,5	40,6	41	41,5	42	42,5	40,60	40,80	40,79	42	42,5	99,02	99,51	98,29	100,00	100,00

Dari penyajian Tabel 2.2 diatas dapat dilihat, bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus mengalami peningkatan, tetapi belum secara signifikan rasio capaian tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, seperti masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan potensi yang ada, masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya ikan, masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan, masih tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar, dan masih terbatasnya dukungan lintas sektor.

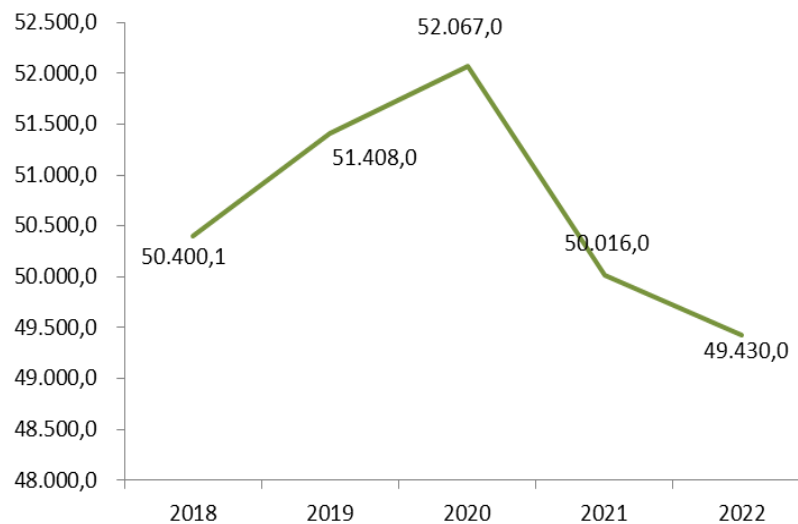
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 s/d 2026

No	Program Prioritas	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	27.729.898.253	30.072.138.078	32.415.101.886	34.738.862.074	37.500.498.281	21.644.963.891	23.577.578.316	22.330.655.717	22.815.634.380	22.815.634.380	78,06	78,40	68,89	65,68	60,84
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.417.920.000	9.321.740.000	7.836.810.000	8.393.820.000	14.070.000.000	6.451.388.700	6.756.444.636	4.755.245.097	3.998.079.980	3.998.079.980	48,08	72,48	60,68	47,63	28,42
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.258.000.000	7.808.500.000	8.535.000.000	9.211.000.000	9.843.000.000	2.676.692.762	5.423.260.858	5.046.464.837	2.564.802.500	2.564.802.500	36,88	69,45	59,13	27,84	26,06
3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.564.500.000	3.120.000.000	3.590.000.000	5.100.000.000	5.315.000.000	1.318.637.478	1.123.506.640	770.862.064	882.468.000	882.468.000	51,42	36,01	21,47	17,30	16,60
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.437.000.000	3.691.382.400	1.327.000.000	1.407.800.000	1.562.400.000	532.447.400	3.547.503.880	611.292.891	3.014.629.900	350.000.000	21,85	96,10	46,07	214,14	22,40
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.759.100.000	4.649.800.000	5.061.500.000	5.477.800.000	5.592.052.580	1.593.990.435	1.536.432.431	1.296.752.965	720.528.750	720.528.750	27,68	33,04	25,62	13,15	12,88

Sedangkan pada Tabel 2.3 diatas diketahui bahwa dukungan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terus mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan, dikarenakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun tidak terealisasi secara menyeluruh.

Perkembangan produksi perikanan tahun 2018–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 50.400,1 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 52.067 ton, namun kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.

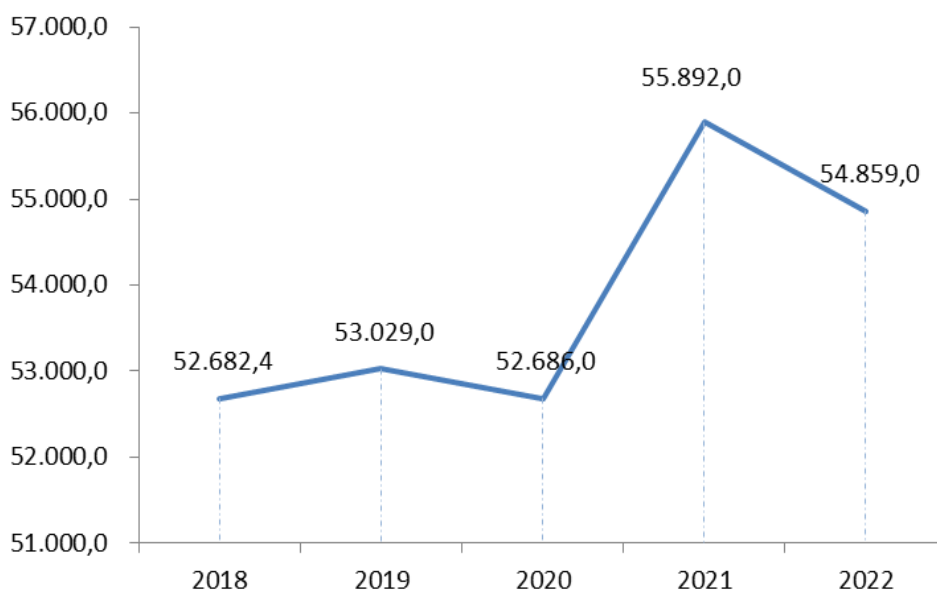
Gambar 2.13. Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022



Sumber BPS 2023

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2018-2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 50.400,1 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut salah satunya akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

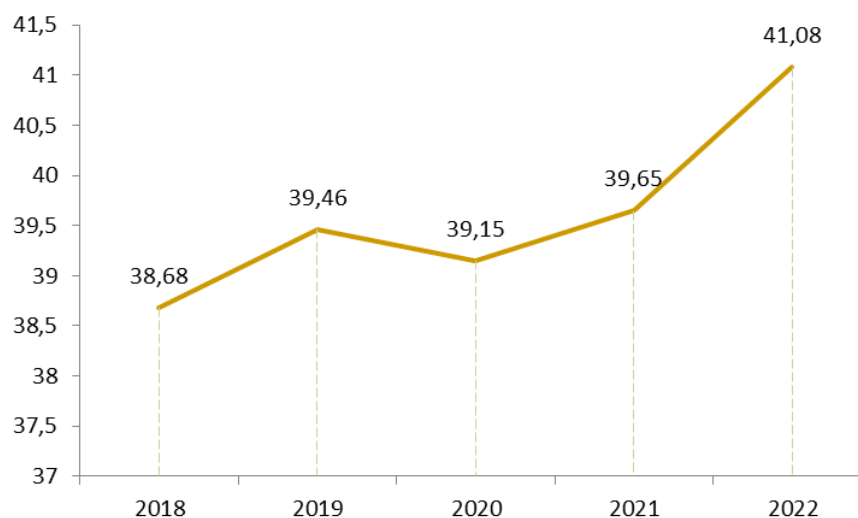
Gambar 2.14. Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton) Tahun 2018-2022



Sumber BPS 2023

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.

Gambar 2.15. Perkembangan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)



Sumber BPS 2023

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah sekumpulan individu atau kelompok yang menjadi fokus utama dalam suatu program, proyek, atau kebijakan tertentu. Kelompok ini dipilih karena mereka memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks perencanaan sosial, ekonomi, atau pembangunan, mengetahui dan memahami kelompok sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Adapun jenis-jenis kelompok sasaran dapat terbagi sebagai berikut:

1. Kelompok Sasaran Berdasarkan Demografi

- a. **Usia:** Misalnya, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia.
- b. **Jenis Kelamin:** Program yang menargetkan perempuan atau laki-laki.
- c. **Status Sosial Ekonomi:** Kelompok dengan status ekonomi tertentu, seperti keluarga miskin, buruh, atau kelompok dengan pendapatan rendah.

2. **Kelompok Sasaran Berdasarkan Lokasi Geografis**

Kelompok sasaran juga dapat ditentukan berdasarkan lokasi geografis. Misalnya, program pembangunan yang difokuskan pada daerah terpencil atau kawasan perkotaan.

3. **Kelompok Sasaran Berdasarkan Kebutuhan Khusus**

Ini meliputi kelompok dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, anak yatim piatu, atau kelompok yang tinggal di kawasan rawan bencana.

4. **Kelompok Sasaran Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Budaya**

Dalam beberapa kasus, kelompok sasaran ditentukan oleh faktor sosial dan budaya, seperti kelompok etnis tertentu, komunitas adat, atau kelompok yang memiliki gaya hidup atau kepercayaan tertentu.

Pentingnya Menentukan Kelompok Sasaran dalam Perencanaan Program dan Kegiatan adalah :

1. **Efektivitas Program**

Menentukan kelompok sasaran yang tepat membantu memastikan bahwa program atau kebijakan yang dilaksanakan tepat sasaran. Tanpa kelompok sasaran yang jelas, program bisa jadi tidak efektif atau bahkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. **Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat**

Dengan memahami kelompok sasaran, alokasi sumber daya, baik itu dana, tenaga, maupun waktu, dapat dilakukan secara efisien. Ini penting untuk menghindari pemborosan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.

3. **Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik**

Dengan mendefinisikan kelompok sasaran, pemantauan dan evaluasi terhadap hasil program menjadi lebih mudah. Hal ini memungkinkan penyesuaian atau perbaikan yang cepat bila diperlukan.

4. **Keberlanjutan Program**

Mengetahui dan memahami kelompok sasaran juga membantu dalam merencanakan keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang sesuai, keberlanjutan dan dampak jangka panjang program dapat terjamin.

5. Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan

Kelompok sasaran yang merasa bahwa program tersebut relevan dengan kebutuhan mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dan merasakan manfaatnya. Ini meningkatkan tingkat kepuasan dan keberhasilan program.

Penentuan kelompok sasaran yang tepat dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain :

1. Analisis Kebutuhan

Melakukan riset untuk memahami masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat atau target pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus.

2. Segmentasi Sosial

Mengidentifikasi kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, status ekonomi, atau geografis.

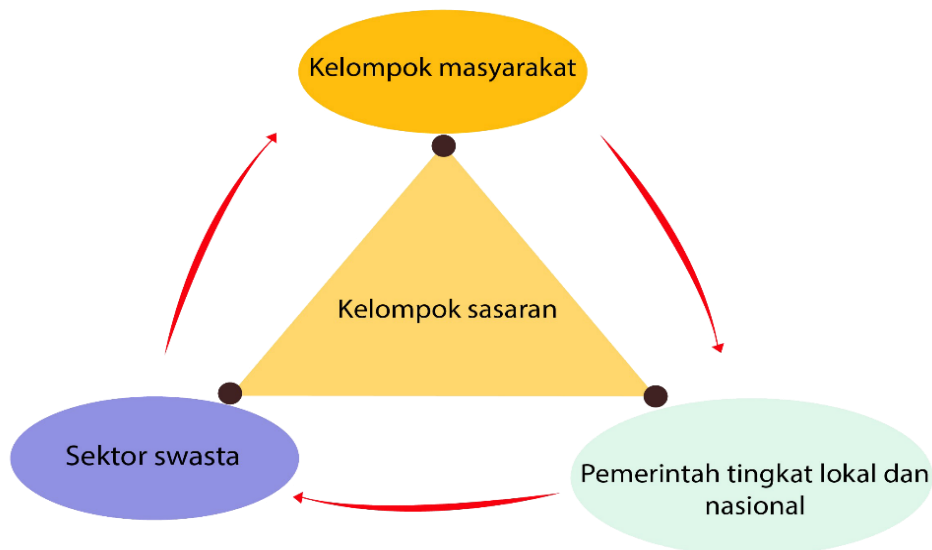
3. Konsultasi dengan Stakeholder

Berbicara dengan pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, seperti pemerintah lokal, LSM, atau kelompok masyarakat itu sendiri.

4. Penilaian Sumberdaya

Menilai sumber daya yang tersedia dan menentukan kelompok mana yang dapat dilayani secara optimal dengan sumber daya tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam menentukan Kelompok Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), seperti dalam diagram di bawah ini :



1. Kelompok Sasaran 1 : Kelompok Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat ini merupakan kelompok yang disulkan melalui usulan aspirasi dari Kabupaten/Kota atau Usulan Pokok Pikiran (POKIR) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau usulan langsung Masyarakat/kelompok masyarakat ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas kelautan dan Perikanan.

Adapun kelompok sasaran Masyarakat yang menjadi fokus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah kelompok Nelayan, kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Pengawas Perikanan.

2. Kelompok Sasaran 2 : Kelompok Pemerintah Tingkat Lokal dan Nasional

Kelompok sasaran ini berfokus pada menjalin kerja sama antar instansi yang memberikan umpan balik seperti dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang peningkatan Pembangunan kelautan dan perikanan.

3. Kelompok Sasaran 3 : Kelompok Swasta

Kelompok sasaran ini berfokus pada pihak swasta non profit atau profit untuk peningkatan Pembangunan kelautan dan perikanan.

2.2. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Melambatnya pertumbuhan Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas SDM pembudidaya • Belum optimalnya kualitas benih dan induk unggul • Belum optimalnya kualitas air • maraknya hama penyakit • Mahalnya pakan • Belum optimalnya penerapan CPIB dan CBIB • Belum optimalnya pelaku usaha untuk melakukan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas SDM nelayan • Menurunnya stok sumber daya ikan • Belum memadainya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan • Belum optimalnya teknologi penangkapan ikan • Belum optimalnya akses nelayan terhadap fasilitas penangkapan ikan • Belum optimalnya kesadaran nelayan untuk mengurus dokumen administrasi • Ketidakpastian kondisi alam, cuaca dan perubahan iklim
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas Pengolahan • Belum optimalnya akses pasar Produk Kelautan dan Perikanan • Belum optimalnya kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran • Rendahnya tingkat konsumsi ikan • Belum optimalnya teknologi kemasan produk hasil perikanan
	Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	Belum optimalnya pelaku usaha yang terakses informasi, teknologi dan permodalan di bidang kelautan dan perikanan
	Degradasi fungsi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya luas kerusakan mangrove dan terumbu karang • Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan
	Belum optimalnya Pengelolaan Ruang Laut	Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi
Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu • Belum optimalnya ragam produk hasil perikanan
Belum optimalnya produksi benih ikan unggul	Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas induk ikan • Belum optimalnya Fungsi BBI/Intlasi Ikam

2.2.2. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

Untuk mendukung Visi Nasional, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** serta untuk mendukung Misi **ASTA CITA** Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan **ekonomi biru**.
3. Melanjutkan **pengembangan infrastruktur** dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, **mendorong kewirausahaan**, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, **pendidikan, kesehatan**, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. **Melanjutkan hilirisasi** dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. **Membangun dari desa dan dari bawah** untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan **pemberantasan kemiskinan**.
7. Memperkuat reformasi politik, **hukum, dan birokrasi**, serta memperkuat pencegahan dan **pemberantasan korupsi**, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan**, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dari kedelapan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung misi Asta Cita kedua hingga kedelapan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Misi Presiden dan wakil Presiden terpilih dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.4. Keterkaitan Misi KKP dengan Misi Aswa Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih



Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

A. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju **Indonesia Emas 2045**

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025 – 2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan tujuh dari sdelapan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi :

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, terdiri dari :

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan perikanan;
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Selanjutnya jika dilihat dari Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung 4 (empat) dari 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Keterkaitan antara Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Jambi

Tujuan KKP	Tujuan DKP	Sasaran Strategis KKP	Sasaran DKP	Indikator Sasaran DKP
Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	SS1. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Alat Tangkap/Tahun) 2. Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Ton)
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif		SS2. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan perikanan		
Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan		SS3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan		SS4. Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten		

2.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.3.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

- Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

2.2.3.2. Misi

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pembangunan, kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi berdasarkan Misi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - b. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital.
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi 2 :

2. Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah.
 - b. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro .
 - c. Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah .
 - d. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi 3 :

3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan
 - c. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat
 - d. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
 - e. Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 mendukung Misi ketiga, yaitu : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam table di bawah ini :

Tabel 2.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Terwujudnya JAMBI Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Indeks Ekonomi Biru	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/ Alat Tangkap/Tahun)
					Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Nilai)		2. Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Tahun)
					Persentase Penduduk miskin ekstrim di wilayah Pesisir (%)				

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung Program Unggulan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Periode Tahun 2025-2029 yang disebut dengan “PROgram Jaringan Majukan JamBI” atau PRO JAMBI.

Quick Wins PROgram Jaringan Majukan JamBI atau PRO JAMBI terbagi dalam lima menu utama, yaitu :

1. Pro Jambi CERDAS, berupa bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 untuk umum. Selain itu juga terdapat pula menu pendidikan vokasi secara kemitraan dengan Lembaga/ Dunia Usaha baik dalam maupun luar negeri. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa.
2. PRO Jambi SEHAT, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan gizi bagi ibu hamil, balita dan remaja, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota.
3. Pro Jambi RESPONSIF, berupa bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif Babinsa/Babinkamtibmas; membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba) dan Saluran Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) yang menghimpun aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat
4. **Pro Jambi TANGGUH**, berupa bedah rumah; bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* milenial/Gen Z siap kerja; job fair (bursa kerja) mantap berdaya saing; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti sopir angkot, ojek online dan pangkalan, penarik becak dan kusir delman, serta seniman dan budayawan; kredit murah 2% bagi petani, nelayan dan pedagang pasar tradisional. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

dan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pro Jambi AGAMIS, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung menu Pro Jambi, yaitu Pro **Jambi TANGGUH**. Adapun skema pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.7. Rencana Target Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan

Uraian	2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		2026	2027	2028	2029	2030
		Target	Target	Target	Target	Target
1	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Laut	30 Unit	30 Unit	35 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit
Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Laut	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 unit	30 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Unit Usaha	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha

untuk lebih jelasnya diagram kewenangan urusan kelautan dan perikanan dalam mendukung **PROgram Jaringan Majukan JamBI (PRO JAMBI)** dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.5. **PRO**gram Jaringan Memajukan JamBI



Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

2.2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya melimpahkan kewenangan wilayah perairan laut dari 0-12 mil yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota (0-4 mil) kini dikelola oleh Provinsi secara menyeluruh. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengawasan yang ketat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dengan melakukan penangkapan di area penangkapan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, membudidayakan ikan secara baik dan benar serta mengolah produk perikanan yang berkualitas baik.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus berusaha membantu nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada serta melakukan pengawasan secara menyeluruh dari hulu

hingga ke hilir kegiatan kelautan dan perikanan demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan.

2.2.5. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi aspek gambaran pelayanan dan kegiatan terkait dengan RPJMD Provinsi Jambi, Renstra K/L, RTRW dan RZWP3K, untuk pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal pada Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a. *Faktor Internal*

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strengths)*

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar.
2. Potensi ekonomi sumber daya non-hayati yang besar (energi terbarukan, biofarmakologi, wisata Bahari, sedimentasi laut, jasa kelautan).
3. Potensi pasar *seafood* yang besar
4. Ketersediaan tenaga kerja (potensi bonus demografi)
5. Dukungan kebijakan pemerintah

- *Kelemahan (Weakness)*

1. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih menggunakan teknologi tradisional.
2. Potensi sumber daya yang besar namun belum dikelola optimal.
3. Infrastruktur yang belum memadai.
4. Biaya ongkos produksi yang mahal (BBM dan pakan).
5. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Masih terbatasnya SDM yang kompeten di sektor kelautan dan perikanan.
7. Tumpang tindih regulasi pengelolaan ruang laut.

b. *Faktor Eksternal*

Faktor eksternal merupakan faktor yang dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pembangunan, berupa peluang dan tantangan dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun regional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- *Peluang (Opportunities)*

1. Peningkatan permintaan terhadap produk kelautan dan perikanan berkelanjutan.
2. Perkembangan teknologi.
3. Pengarusutamaan ekonomi biru di tingkat global.
4. Kerjasama regional dan nasional.

- *Ancaman (Threat)*

1. Perubahan iklim.
2. Degradasi wilayah pesisir dan laut.
3. Penangkapan ikan ilegal.
4. Pencemaran perairan laut maupun daratan.
5. Persaingan global.
6. Fluktuasi harga pasar.

Dari uraian di atas SWOT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 tertuang dalam Tabel di bawah ini :

Bertitik tolak dari identifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu, keterkaitan antara permasalahan dengan isu strategis dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel 2.9. Keterkaitan permasalahan dengan isu-isu strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	Pencemaran perairan Laut dan daratan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim - Penangkapan Ilegal - Hilangnya keenaekaragaman Hayati - Fluktuasi Harga Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim - Penangkapan Ilegal - Hilangnya keenaekaragaman Hayati - Persaingan Global - Fluktuasi Harga Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim - Degradasi Wilayah Pesisir dan Laut - Alih Fungsi lahan perikanan - Fluktuasi Harga Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap - Belum optimal - Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lamban - Angka konsumsi ikan Provinsi Jambi Masih Rendah - Minimnya Penjaminan Mutu Produk Olahan Pangan - pemanfaatan ruang laut belum optimal - kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi - Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan Perikanan belum optimal - Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah belum optimal
	Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih					
	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap					
	Degradasi fungsi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan					
	Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan					
	Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan					
	Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi					
	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah					

Dari hasil review terhadap beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Provinsi Jambi beserta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya, maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Belum optimal;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lambat;
3. Angka konsumsi ikan Provinsi Jambi Masih Rendah;
4. Minimnya penjaminan mutu produk olahan pangan;
5. pemanfaatan ruang laut belum optimal;
6. kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi;
7. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan Perikanan belum optimal;
8. Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah belum optimal

BAB.III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

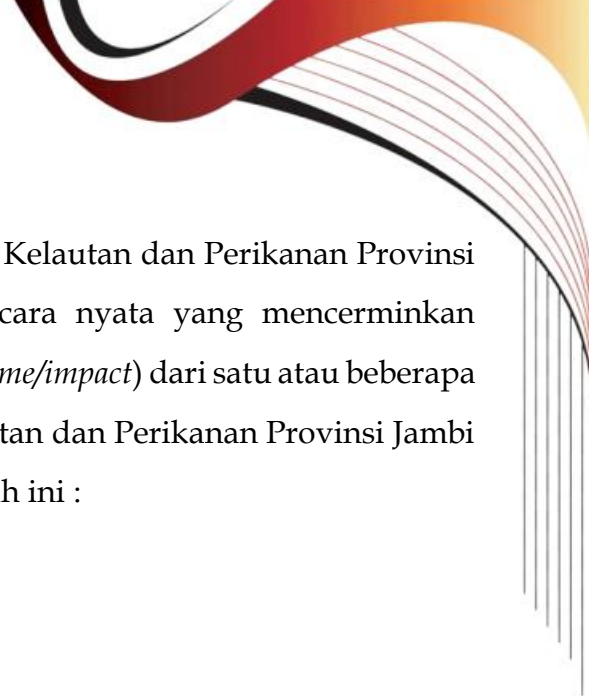
3.1. Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung dua misi, yaitu Misi Pertama, yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**, dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis. Indikator tujuan RPJMD dari Misi pertama ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan misi ketiga, yaitu **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dengan tujuan Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah Indeks Ekonomi Biru.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”**.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Adapun sasaran strategis dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Rencana Tujuan dan Sasasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2024)	2025	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)			99,32	100,26	101,85	102,15	102,92	103,45	103,89	103,89
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) (Nilai)			101,94	102,15	102,38	103,75	103,98	104,25	104,65	104,65
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Alat Tangkap/Tahun)	169,15	169,66	170,16	170,67	171,18	171,70	172,21	172,21	
			Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Tahun)	89,85	92,28	92,54	96,24	100,09	105,09	110,35	110,35	

Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan adalah :

A. Pengembangan Sentra Perikanan

Sentra Perikanan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jambi terpilih.

Pengembangan Sentra Perikanan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan sentra perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan sentra perikanan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Daerah dan nasional.

Pendekatan pengembangan Sentra Perikanan melalui :

1. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang mapan.

2. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

3. Sentra Produksi

Sentra Perikanan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya dan telah menerapkan teknologi inovatif dengan kawasan dan mutu terjamin.

4. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

5. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan sentra perikanan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

6. Lintas Sektor

Sentra Perikanan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Sentra Perikanan antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pengembangan pelabuhan perikanan dengan prioritas di Kuala Tungkal dan Nipah Panjang, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 5.100 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya, (iv) memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan, (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system), sentra pengolahan, sentra industri hasil perikanan dan pasar ikan) di 11 Kab/Kota;

2. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor;
3. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan ;
4. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
5. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) ;
6. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil
7. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan meliputi: (i) usaha perikanan tangkap, (ii) usaha perikanan budidaya (iii) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

B. *Entrepreneurship*

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi *entrepreneurship* akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam memproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, Swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN.

i. **Networking**

Setiap individu dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal Provinsi-Kabupaten/Kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (ekspor). Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

ii. **Teknologi dan Inovasi**

Dinas Kelautan dan Perikanan akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

iii. *Empowering*

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumberdaya ikan, pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii)

meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola bottom up sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

iv. Penguatan Kelembagaan kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun secara rinci penahapan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan selama lima tahun kedepan dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk Peningkatan Produksi (Pengembangan Sentra Perikanan)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk Peningkatan Produksi (Pengembangan Sentra Perikanan)	Enterpreunership (Pengembangang Kewirausahaan serta Pengutan Teknologi dan Inovasi	Enterpreunership (Pengembangang Kewirausahaan serta Pengutan Teknologi dan Inovasi	Pengutan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

3.3. Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap.
3. Meningkatkan Produk Perikanan Budidaya
4. Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya kelautan dan perikanan dan keanekaragaman hayati.
5. Meningkatkan Komsumsi Ikan oleh Masyarakat.
6. Meningkatkan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
7. Meningkatkan Fasilitas Layanan Kepelabuhan Perikanan
8. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jambi disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Daerah dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap berkelanjutan.
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan.
4. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
6. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas AKIP dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan DKP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya Kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Meningkatkan Pengelolaan Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan dengan Rincian Strategi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan perlindungan kawasan konservasi melalui Penetapan Perda - Pembangunan modeling pengelolaan kawasan konservasi terpadu untuk <i>carbon storage</i> - Penyusunan <i>Ocean Accounting</i> - Pembangunan sistem <i>ocean big data</i> berbasis digital 	Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan
	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Budidaya Optimal	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Budidaya Optimal, dengan Rincian Strategi Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tata kelola penangkapan ikan terukur - Penguatan infrastruktur dan teknologi perikanan tangkap - Pengembangan pelabuhan sebagai pusat industri perikanan terintegrasi dan pusat aktivitas ekonomi perikanan - Pembangunan perikanan tangkap yang inklusif 	Meningkatkan produksi perikanan tangkap berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tata kelola perikanan budi daya berkelanjutan - Peningkatan produktivitas budi daya untuk memenuhi kebutuhan pangan akuatik - Peningkatan akses permodalan - Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas 	Meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan

		<p>perikanan budi daya unggulan untuk mendorong <i>share</i> produk perikanan Daerah pada rantai pasok Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan perikanan budi daya yang inklusif - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pembudi daya ikan - 	
	Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya kelautan dan perikanan dan keanekaragaman hayati	<p>Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya kelautan dan perikanan dan keanekaragaman hayati Rincian Strategi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan regulasi tata kelola perikanan tangkap - Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan kawasan konservasi - Mengembangkan potensi ekonomi Wilayah Kawasan konservasi - Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan Daerah	<p>Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Daerah dengan Rincian Strategi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Pendidikan terhadap Nelayan, Pembudidaya dan Pelaku UKM Olahan Ikan - Promosi dan Sosialisasi Gemarikan melalui Media Cetak, Sosial, dan Elektronik - Pemberian Insentif bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Penguatan produk perikanan bermutu, bernilai tambah dan aman konsumsi 	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik dengan rincian Strategi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelasan Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pemenuhan Pelaporan Kinerja yang berkualitas - Memperkuat evaluasi internal 	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas SAKIP dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel

Adapun keterkaitan Kebijakan RPJMD dengan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel. 3.4. Keterkaitan Kebijakan RPJMD dengan Kebijakan PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan DKP	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk	Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	
		Pemberdayaan masyarakat pesisir		
		Pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTRW		
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	
		Meningkatkan pengawasan ter hadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan	
		Peningkatan pengolahan hasil perikanan	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	
		Mengalakan program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)		
		Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	

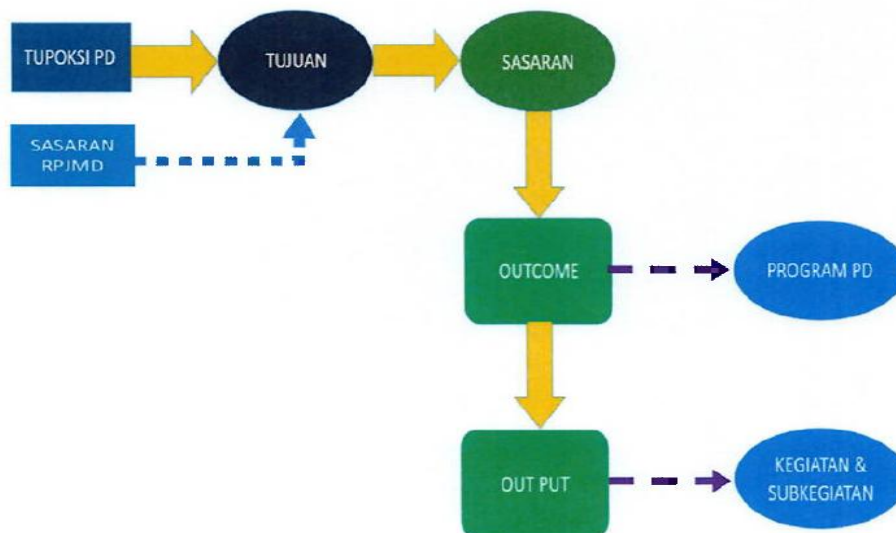
BAB. IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan Rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Adapun kerangka perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini :

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan



Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan enam program 24 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah :

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

- 6) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau
- 7) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 8) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :**
 - Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2) **Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :**
 - Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

- 9) **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :**
- Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil :**
- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
 - Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap
- 2) **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**
- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
 - Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap
- 3) **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :**
- Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
- 4) **Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi**
- Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT.

5) Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :

- Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan
- Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat :

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil :

- Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkakan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi
- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

-

2) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :

- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Pemetaan dan pemantauan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 20229

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan				Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)			
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Nilai)			
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Alat Tangkap/Tahun)		
						Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Tahun)		
		Meningkatnya Pengelolaan Laut Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sumber Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan				Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap PDRB (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
						Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Wilayah Perairan yang Dikelola berdasarkan RZWP3K	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
						Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	<i>Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat</i>
						Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	<i>Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>

				Terlaksananya Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>
				Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	<i>Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir</i>
				Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	<i>Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia</i>
				Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	<i>Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru</i>
				Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	<i>Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan</i>
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	<i>Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon</i>
				Meningkatnya Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
				Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir</i>

				Reklamasi di Perairan Pesisir		
				Terlaksananya Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	<i>Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan</i>
				Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>
				Terlaksananya Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<i>Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>

				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>
				Tersedianya Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	<i>Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur</i>
				Tersedianya Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	<i>Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur</i>
				Tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	<i>Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	- <i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 Gt sampai dengan 30 GT</i>
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi
				Terlaksananya Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	<i>Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT</i>
				Meningkatnya fasilitas layanan Kepelabuhan Perikanan	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	- <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan</i>
				Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	- <i>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan</i>
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</i>
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan</i>
				Meingkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
				Tersedianya Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>
				Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>

				Terlaksananya Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	<i>Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
				Tersedianya sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati		Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>
				Terlaksananya Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	<i>Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan</i>
				Terlaksananya Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	<i>Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ ayau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi</i>

				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	<i>Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</i>
				Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	<i>Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</i>
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>
				Terlaksananya Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	<i>Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>
				Terlaksananya Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,	<i>Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>
				Terlaksananya Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa	<i>Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>

				sesuai kewenangan provinsi		
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpt?Thn)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>
				Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	<i>Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>
				Meningkatnya Mutu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Pengolah/Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

			Terlaksananya, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	- Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
			Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Terlaksananya Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

			Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	
					Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	
					Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Presentase Layanan Administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	<i>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya</i>
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<i>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	Administrasi Umum Perangkat daerah
			Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
			Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
			Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>
			Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
			Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
			Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
				Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	<i>Pengadaan Mebel</i>
				Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>
				Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
				Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<i>Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
				Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja	Base Line (2024)	2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,25,	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	99,32	100,26	101,85	74.200.000.000	102,15	78.868.000.000	102,92	82.375.000.000	103,45	87.012.000.000	103,89	89.774.000.000	103,89
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Nilai)	101,94	102,15	102,38		103,75		103,98		104,25		104,65		
		Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Alat Tangkap/Tahun)	169,15	169,66	170,16		170,67		171,18		171,80		172,21		
		Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Tahun)	89,85	92,28	92,54		96,24		100,09		105,09		110,35		
3,25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86	86,76	35.000.000.000	87,25	37.000.000.000	87,95	38.000.000.000	88,65	39.000.000.000	89,2	39.000.000.000	89,2
		Nilai AKIP Perangkat daerah (Nilai)	76,76 (BB)	77	78,26 (BB)		80,35 (A)		80,85 (A)		81,45 (A)		82,00 (A)		
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	65	70,01	71		72		73		74		75		
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan (%)	90	90	90	1.830.000.000	90	1.830.000.000	90	1.830.000.000	90	1.830.000.000	90	1.830.000.000	90
		Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (%)	90	90	90		90		90		90		90		
		Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja (%)	95	95	95		100		100		100		100		
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	100	100	100	26.665.500.000	100	26.665.500.000	100	29.665.500.000	100	30.665.500.000	100	30.665.500.000	100
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/Bulan	151 Orang/Bulan	151 Orang/Bulan	26.015.500.000	152 Orang/Bulan	28.015.500.000	154 Orang/Bulan	29.015.500.000	156 Orang/Bulan	30.015.500.000	158 Orang/Bulan	30.015.500.000	158 Orang/Bulan
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	100	100	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	265.000.000	2 Laporan	265.000.000	2 Laporan	265.000.000	2 Laporan	265.000.000	2 Laporan	265.000.000	2 Laporan
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	100	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300 Paket	300 Paket	325 Paket	230.000.000	325 Paket	230.000.000	325 Paket	230.000.000	325 Paket	230.000.000	325 Paket	230.000.000	325 Paket
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang
3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	280.000.000	200 Orang	280.000.000	200 Orang	280.000.000	200 Orang	280.000.000	200 Orang	280.000.000	200 Orang

3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	100	100	100	1.191.000.000	100	1.191.000.000	100	1.191.000.000	100	1.191.000.000	100	1.191.000.000	100
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	25.000.000	10 Paket	25.000.000	10 Paket	25.000.000	10 Paket	25.000.000	10 Paket	25.000.000	10 Paket
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	300.000.000	20 Paket	300.000.000	20 Paket	300.000.000	20 Paket	300.000.000	20 Paket	300.000.000	20 Paket
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	120.000.000	5 Paket	120.000.000	5 Paket	120.000.000	5 Paket	120.000.000	5 Paket	120.000.000	5 Paket
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	65.000.000	5 Paket	65.000.000	5 Paket	65.000.000	5 Paket	65.000.000	5 Paket	65.000.000	5 Paket
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2.180.000.000	6 Laporan	2.180.000.000	6 Laporan	2.180.000.000	6 Laporan	2.180.000.000	6 Laporan	2.180.000.000	6 Laporan
3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5 Unit	450.000.000	5 Unit	450.000.000	5 Unit	450.000.000	5 Unit	450.000.000	5 Unit	450.000.000	5 Unit
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	180.000.000	5 Paket	180.000.000	5 Paket	180.000.000	5 Paket	180.000.000	5 Paket	180.000.000	5 Paket
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit

3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	8 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	90	90	90	648.500.000	90	648.500.000	90	648.500.000	90	648.500.000	90	648.500.000	90
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100	100	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	59 Unit	59 Unit	480.000.000	59 Unit	480.000.000	59 Unit	480.000.000	59 Unit	480.000.000	59 Unit	480.000.000	59 Unit
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	350.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	330.000.000	3 Unit	330.000.000	3 Unit	330.000.000	3 Unit	330.000.000	3 Unit	330.000.000	3 Unit
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	150.000.000	20 Unit	150.000.000	20 Unit	150.000.000	20 Unit	150.000.000	20 Unit	150.000.000	20 Unit
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap PDRB (%)	2,16	2,16	2,17	2.250.000.000	2,18	1.600.000.000	2,19	1.600.000.000	2,20	1.600.000.000	2,21	1.600.000.000	2,21

	DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Wilayah Perairan yang Dikelola berdasarkan RZWP3K	0%	20%	27%	1.870.000.000	14%	1.220.000.000	28%	1.220.000.000	16%	1.220.000.000	14%	1.220.000.000	100%
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	N/A	11.213,36 Ha	10.772,33 Ha	750.000.000	5.715,13 Ha	565.000.000	11.244,38 Ha	565.000.000	6.221,44 Ha	565.000.000	5.711,22 Ha	565.000.000	39.664,50 Ha
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	N/A	50 Ha	50 Ha	200.000.000	50 Ha	85.000.000	50 Ha	85.000.000	50 Ha	85.000.000	50 Ha	85.000.000	250 Ha
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	N/A	60 Orang	60 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	300 Orang
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	N/A	0 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen
3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	N/A	0 Kegiatan	1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	N/A	0 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	60.000.000	25 Pelaku Usaha	60.000.000	25 Pelaku Usaha	60.000.000	25 Pelaku Usaha	60.000.000	25 Pelaku Usaha	60.000.000	25 Pelaku Usaha
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	N/A	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen

3.25.02.1.01.0011	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	N/A	0 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok masyarakat	100.000.000	5 Kelompok masyarakat	65.000.000	5 Kelompok masyarakat	65.000.000	5 Kelompok masyarakat	65.000.000	5 Kelompok masyarakat	65.000.000	5 Kelompok masyarakat
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	120.000.000	2 Izin	120.000.000	2 Izin	120.000.000	2 Izin	120.000.000	2 Izin	120.000.000	10 Izin
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	N/A	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	25 Kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	260.000.000	30 Kelompok	260.000.000	30 Kelompok	260.000.000	30 Kelompok	260.000.000	30 Kelompok	260.000.000	30 Kelompok
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	60 Orang	60 Orang	65.000.000	60 Orang	65.000.000	60 Orang	65.000.000	60 Orang	65.000.000	60 Orang	65.000.000	60 Orang
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	75.000.000	8 Kelompok	75.000.000	8 Kelompok	75.000.000	8 Kelompok	75.000.000	8 Kelompok	75.000.000	8 Kelompok
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	3 Kelompok	5 Kelompok	120.000.000	5 Kelompok	120.000.000	5 Kelompok	120.000.000	5 Kelompok	120.000.000	5 Kelompok	120.000.000	5 Kelompok
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	45.187	46.467	47.500	14.070.000.000	48.300	15.200.000.000	49.800	16.400.000.000	51.200	17.600.000.000	52.400	18.800.000.000	52.400
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	41.760 Ton	41.247 Ton	42,200 Ton	5.470.000.000	42.800 Ton	8.800.000.000	43.200 Ton	8.800.000.000	44,900 Ton	10.290.000.000	45.600 Ton	11.225.000.000	45.600 Ton

3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	100 Unit	100 Unit	4.000.000.000	150 Unit	6.500.000.000	150 Unit	6.500.000.000	150 Unit	7.500.000.000	150 Unit	8.420.000.000	150 Unit
3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	0 Unit	0 Unit	10 Unit	620.000.000	10 Unit	1.450.000.000	10 Unit	1.450.000.000	10 Unit	1.450.000.000	10 Unit	1.450.000.000	10 Unit
3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	0 Unit	0 Unit	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Unit	0 Unit	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	790.000.000	10 Unit	790.000.000	10 Unit
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	3.407 Ton	4.120 Ton	5,300 Ton	3.140.000.000	5,500 Ton	3.140.000.000	5.700 Ton	3.140.000.000	6.300 Ton	4.050.000.000	6.800 Ton	4.065.000.000	6.800 Ton
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	50 Unit	50 Unit	65 Unit	3.090.000.000	65 Unit	3.090.000.000	65 Unit	3.090.000.000	65 Unit	4.000.000.000	65 Unit	4.000.000.000	65 Unit
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	1 SIPI/SIKPI	1 SIPI/SIKPI	1 SIPI/SIKPI	450.000.000	1 SIPI/SIKPI	450.000.000	1 SIPI/SIKPI	450.000.000	1 SIPI/SIKPI	450.000.000	1 SIPI/SIKPI	500.000.000	5 SIPI/SIKPI

3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	N/A	N/A	65%	200.000.000	65%	200.000.000	65%	200.000.000	65%	200.000.000	65%	250.000.000	65%
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	N/A	N/A	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	N/A	N/A	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	N/A	N/A	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	N/A	N/A	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berubah di pelabuhan perikanan	4180 Kapal	4180 Kapal	4.350 Kapal	4.950.000.000	4.370 Kapal	2.750.000.000	4.400 Kapal	3.950.000.000	4.450 Kapal	2.750.000.000	4.460 Kapal	2.950.000.000	4.460 Kapal
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	2 unit	4.500.000.000,00	2 Unit	2.300.000.000	2 unit	3.500.000.000	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit	2.500.000.000	2 Unit
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	450.000.000,00	2 Layanan	450.000.000	2 Layanan	450.000.000	2 Layanan	450.000.000	2 Layanan	450.000.000	2 Layanan
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	49,595	50.937,70	51.082	11.880.000.000	53.125	13.068.000.000	55.250	14.375.000.000	58012	15.812.000.000	60.912	17.374.000.000	60.912

3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	N/A	1 izin usaha	1 izin usaha	450.000.000	1 izin usaha	450.000.000	1 izin usaha	450.000.000	1 izin usaha	550.000.000	1 izin usaha	650.000.000	5 Izin Usaha
3.25.04.1.01.0002	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	N/A	N/A	1 Rekomendasi	200.000.000	1 Rekomendasi	200.000.000	1 Rekomendasi	200.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	5 Rekomendasi
3.25.04.1.01.0003	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	N/A	N/A	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.595.000.000	2 Kegiatan	2.100.000.000	2 Kegiatan	2.707.000.000	2 Kegiatan	3.430.000.000	2 Kegiatan	4.074.000.000	2 Kegiatan
3.25.04.1.05.0004	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	N/A	N/A	5 Unit	450.000.000	5 Unit	550.000.000	5 Unit	650.000.000	5 Unit	680.000.000	5 Unit	720.000.000	5 Unit
3.25.04.1.05.0007	<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Jumlah Pembudidaya	N/A	N/A	60 orang	150.000.000	60 orang	150.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang	250.000.000	60 orang	250.000.000	300 Orang
3.25.04.1.05.0011	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	2 unit	2 unit	10 unit	650.000.000	10 unit	750.000.000	10 unit	850.000.000	10 unit	1.050.000.000	10 unit	1.500.000.000	10 Unit
3.25.04.1.05.0012	<i>Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	N/A	N/A	1 Dokumen	345.000.000	2 Dokumen	650.000.000	2 Dokumen	1.007.000.000	2 Dokumen	1.450.000.000	2 Dokumen	1.604.000.000	2 Dokumen
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	9.835.000.000	2 Kegiatan	10.518.000.000	2 Kegiatan	11.218.000.000	2 Kegiatan	11.832.000.000	2 Kegiatan	12.650.000.000	2 Kegiatan

3.25.04.1.06.0003	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2.835.000.000	15 Unit	3.000.000.000	15 Unit	3.300.000.000	15 Unit	3.332.000.000	15 Unit	3.650.000.000	15 Unit
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	100 unit	100 unit	7.000.000.000	100 unit	7.518.000.000	100 unit	7.918.000.000	100 unit	8.500.000.000	100 unit	9.000.000.000	100 Unikt
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	0 Ha	11.213,36	10.772,33	5.000.000.000	5.715,13	5.000.000.000	11.244,38	5.000.000.000	6.221,44	5.000.000.000	5.711,22	5.000.000.000	39.664,50
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	66%	60%	60%	4.035.000.000	62%	4.035.000.000	64%	4.035.000.000	66%	4.035.000.000	68%	4.035.000.000	68%
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	2 Unit	1 Unit	385.000.000	2 Unit	385.000.000	2 Unit	385.000.000	2 Unit	385.000.000	2 Unit	385.000.000	2 Unit
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkungan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi dengan 12 mil yang diperiksa	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	750.000.000	3 elaku usaha	750.000.000	5 pelaku usaha	750.000.000	5 pelaku usaha	750.000.000	6 pelaku usaha	750.000.000	6 pelaku usaha
3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	N/A	N/A	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit	2.300.000.000	2 Unit
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	300.000.000	3 pelaku usaha	300.000.000	5 pelaku usaha	300.000.000	5 pelaku usaha	300.000.000	6 pelaku usaha	300.000.000	6 pelaku usaha
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	300.000.000	2 Kelompok Masyarakat	300.000.000	2 Kelompok Masyarakat	300.000.000	2 Kelompok Masyarakat	300.000.000	2 Kelompok Masyarakat	300.000.000	10 Kelompok masyarakat

3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	84%	84%	84%	965.000.000	85%	965.000.000	85%	965.000.000	86%	965.000.000	90%	965.000.000	90%
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	N/A	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	250.000.000	4 pelaku usaha	250.000.000	5 pelaku usaha	250.000.000	5 pelaku usaha	250.000.000	6 pelaku usaha	250.000.000	6 Pelaku Usaha
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	450.000.000	3 pelaku usaha	450.000.000	4 pelaku usaha	450.000.000	5 pelaku usaha	450.000.000	5 pelaku usaha	450.000.000	5Pelaku Usaha
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	N/A	2 plaku uasaha	2 plaku uasaha	265.000.000	3 pelaku usaha	265.000.000	3 pelaku usaha	265.000.000	4 pelaku usaha	265.000.000	4 pelaku usaha	265.000.000	4 Pelaku Usaha
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)	41,50 (Metode Penghitungan Lama)	28,07	28,67	6.000.000.000	29,27	7.000.000.000	29,87	7.000.000.000	30,47	8.000.000.000	31,07	8.000.000.000	31,07
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	N/A	2 Izin	2 Izin	1.400.000.000	2 Izin	1.450.000.000	2 Izin	1.450.000.000	2 Izin	1.450.000.000	2 Izin	1.450.000.000	10 Izin
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000	3 Dokumen	1.250.000.000	3 Dokumen	1.250.000.000	3 Dokumen	1.250.000.000	3 Dokumen	1.250.000.000	3 Laporan

3.25.06.1.01.0007	<i>Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	N/A	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000	3 Rekomendasi	200.000.000	3 Rekomendasi	200.000.000	3 Rekomendasi	200.000.000	3 Rekomendasi	200.000.000	3 Rekomendasi
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kelompok Pengolah/Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan	8 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	1.400.000.000	10 Kelompok	2.100.000.000	10 Kelompok	2.100.000.000	10 Kelompok	2.100.000.000	10 Kelompok	2.100.000.000	60 Kelompok
3.25.06.1.02.0003	<i>Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	650.000.000	4 Kegiatan	850.000.000	4 Kegiatan	850.000.000	4 Kegiatan	850.000.000	4 Kegiatan	850.000.000	4 Kegiatan
3.25.06.1.02.0004	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	750.000.000	3 Kegiatan	1.250.000.000	3 Kegiatan	1.250.000.000	3 Kegiatan	1.250.000.000	3 Kegiatan	1.250.000.000	3 Kegiatan
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi pengolahan hasil perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000.000	1 Dokumen	3.450.000.000	1 Dokumen	3.450.000.000	1 Dokumen	4.450.000.000	1 Dokumen	4.450.000.000	1 Dokumen
3.25.06.1.03.0001	<i>Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	N?A	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen

3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2.500.000.000	10 Unit Usaha	2.750.000.000	10 Unit Usaha	2.750.000.000	10 Unit Usaha	3.750.000.000	10 Unit Usaha	3.750.000.000	10 Unit Usaha
3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	N/A	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	400.000.000	1 Sistem Informasi	400.000.000	1 Sistem Informasi	400.000.000	1 Sistem Informasi	400.000.000	1 Sistem Informasi	400.000.000	1 Sistem Informasi
JUMLAH TOTAL						74.200.000.000		78.868.000.000		82.375.000.000		87.012.000.000		89.774.000.000	

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pengelolaan Laut Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sumber	Kegiatan Pelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	

<p>Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan</p>	-	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
	-	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	-	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
	-	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia	
	-	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	
	-	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	
	-	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	
	<p>Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</p>		
	-	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	
	-	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
	<p>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>		

		- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
		- Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
		- Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
		- Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
		- Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi	
		- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

		- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah	
		- Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
		- Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
		- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
		- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
		- Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
		- Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
		- Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	

		- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
		Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
		- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	
		- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
		- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		- Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
		- Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah	
		- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
			- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahandan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
			- Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
			- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

		- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, pembangunan harus dilakukan dengan arah untuk mengembangkan semua sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Jambi yang layak dikembangkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Diantara misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Berdasarkan Uraian di atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi kedepan dapat dilihat Dalam Tabel di bawah ini

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	99,32	100,26	101,85	102,15	102,92	103,45	103,89	103,89
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	101,94	102,15	102,38	103,75	103,98	104,25	104,65	104,65
3.	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton/Alat Tangkap/Tahun	169,15	169,66	170,16	170,67	171,18	171,80	172,21	172,21
4.	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/Ha/Tahun	89,85	92,28	92,54	96,24	100,09	105,09	110,35	110,35

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan.

Beberapa karakteristik penting dari IKK meliputi:

- **Spesifik** : IKK harus jelas dan tidak ambigu dalam mengukur aspek kinerja tertentu.
- **Terukur** : Harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif.
- **Achievable** : Sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai.
- **Relevan** : Harus selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
- **Time-bound**: Memiliki kerangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya.

Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, yaitu :

- 1) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- 3) Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Pemahaman yang mendalam tentang IKK sangat penting bagi para pemangku kepentingan di pemerintahan. Ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Uraian di atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat Dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2030

Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Persentase Kawasan Konservasi Daerah yang Operasional	Persen	20	27	14	28	16	14	
2. Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Sumber Data One Data KKP)	Ton	97.404,70	98.582	101.425	105.050	109.212	113.312	
- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	46.467	47.500	48.300	49.800	51.200	52.400	
- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	50.937,70	51.082,00	53.125	55.250	58.012	60.912	
3. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan	Persen	75	78	80	83	85	85	

BAB. V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan kerja segenap aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi baik yang bekerja di lingkup kantor utama dan UPTD di daerah serta petugas teknis yang bekerja di lapangan.
2. Perencanaan dan program kerja merupakan langkah yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan karena dari perencanaan dan program kerja tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah *output* yang dapat menjadi acuan, pedoman, dan penuntun dalam pelaksanaan perencanaan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntunan masyarakat. Perencanaan dan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh beberapa bidang diantaranya Bidang Sekretariat, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya saing Produk, UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
3. Penyusunan rencana kerja strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilakukan melalui penyusunan dan penyusunan rencana strategis, draf akhir rencana strategis hingga penyusunan rencana strategis dan tahapan lainnya. Tahap ini dimulai dengan tahap penyusunan rencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana dan kegiatan juga didasarkan pada analisis lingkungan, isu strategis, potensi, peluang, isu pokok dan tantangan yang dihadapi perkembangan lautan Provinsi Jambi dan perikanan, serta arah kebijakan nasional yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat terwujud apabila semua jajaran aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala bidang, para Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan staf, kepala UPTD, Kepala instalasi, para Pejabat Fungsional Tertentu dan tenaga teknis pendamping di lapangan harus memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap setiap Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dengan disiplin, kerja keras serta belajar dalam meningkatkan Inovasi, penguasaan IPTEK di bidang kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan/pembinaan prima kepada pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk perikanan dengan komitmen bersama dan yang tidak kalah penting adalah dukungan anggaran dari Pemerintah maupun pihak swasta yang terkait.
5. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama antara pihak terkait baik secara kelembagaan vertikal, kerjasama dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota juga kerjasama dan sinergi dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BAPPENAS, maupun pihak DPRD, khususnya Komisi II DPRD.
6. Sinergi dan kerjasama Horizontal adalah bekerja sama dan bermitra dengan kelembagaan Dinas lintas sektor seperti Dinas PU, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Balai POM, Bappeda, Biro SDA Kejaksaan dan TNI/POLRI.
7. Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan acuan dan indikator kinerja sebagai bahan evaluasi pimpinan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas.
8. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tanggung jawabnya, otoritas dan keinginan komunitas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa kesimpulan penting substansial untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1. Diharapkan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara SKPD dan UPTD lainnya, sehingga perencanaan dan program kerja di sektor kelautan dan perikanan lebih dapat dimaksimalkan sehingga program/kegiatan yang direncanakan berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Diharapkan aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan lebih ditingkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi, menganalisis, serta meneliti dan mengembangkan perencanaan dan program yang diusulkan oleh masyarakat.
3. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan inovasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Adapun beberapa inovasi yang mungkin bisa diterapkan di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

a. Teknologi Budidaya Perikanan :

- **Sistem Resirkulasi** (Memanfaatkan kembali air dalam budidaya, mengurangi penggunaan air dan limbah);
- **Akuaponik** (Menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman, menciptakan sistem yang saling menguntungkan);
- **Bioflok** (Teknologi yang memanfaatkan bakteri untuk mengolah limbah budidaya menjadi pakan tambahan, meningkatkan efisiensi pakan dan kualitas air);
- **Pakan Ikan berbasis Inovasi** (Mengembangkan pakan ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti pakan terapung atau pakan yang mengandung probiotik);
- **Busmetik** (Budidaya udang skala mini dengan menggunakan kolam plastik, cocok untuk lahan terbatas);

- **Yumina dan Bumina** (Budidaya ikan yang dipadukan dengan sayuran (Yumina) atau buah (Bumina), menciptakan sistem budidaya yang lebih beragam dan berkelanjutan);
 - **Gerakan Budidaya Tangguh** (Gerakan yang ditujukan untuk minat budidaya dengan Tagging *One Home One Pound* atau **Gerakan Budidaya Ikan Satu Rumah satu Kolam**).
- b. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan :**
- **Pengawasan Drone** (Mengawasi aktivitas penangkapan ikan, mencegah penangkapan ilegal dan pemantauan area konservasi);
 - **Sistem Pemantauan Elektronik** (Menggunakan kamera dan sensor untuk memantau tangkapan, memastikan praktik penangkapan yang berkelanjutan);
 - **Aplikasi Berbasis Data** (Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan dan kelautan);
 - **Pelabuhan Perikanan Cerdas (PPI CERDAS)** (Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, melibatkan komunitas nelayan secara aktif).
- c. Inovasi Produk Perikanan :**
- **Diversifikasi Produk Olahan** (Mengembangkan produk olahan perikanan yang beragam, meningkatkan nilai tambah dan daya saing);
 - **Pemanfaatan Limbah** (Mengembangkan produk turunan dari limbah perikanan, mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi baru).
- d. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan :**
- **Pelatihan dan Pendampingan** (Memberikan pelatihan kepada nelayan dan pembudidaya ikan tentang teknologi dan praktik terbaik);
 - **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir** (Mendorong partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan

- **Pusat Layanan Inovasi** (Menyediakan pusat informasi dan konsultasi untuk mendukung pengembangan inovasi di sektor kelautan dan perikanan);
- **Penguatan Kelompok Nelayan** (Memfasilitasi kelompok nelayan untuk berkembang dalam pengelolaan keuangan, dengan cara Gerakan Menabung atau bisa disebut dengan **Gerakan Armada Lebah**).

Harapan kami agar Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dapat ditindak lanjuti oleh semua aparatur di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan rincian rencana aksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga menjadi acuan kerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.

Jambi, 14 November 2025

Kepala Dinas,

Asraf. S.Pt. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196611201994031006